

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, salah satunya melalui penguatan perekonomian daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Tujuan dari otonomi ini adalah agar daerah mampu meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Industri kecil mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini, peran industri kecil tersebut secara lebih luas tercermin dalam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional.

UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi fondasi perekonomian daerah. Namun,

dibalik perannya yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, kesulitan akses permodalan, serta belum dimilikinya legalitas usaha yang sah. Legalitas usaha penting sebagai persyaratan utama bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, memperluas jaringan kemitraan dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Tanpa legalitas usaha, pelaku UMKM akan kesulitan menjangkau peluang bisnis yang lebih luas, terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

Era globalisasi dan perkembangan teknologi digital saat ini, dunia usaha mengalami dinamika persaingan yang kian kuat. Kondisi ini menuntut para pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mampu meningkatkan daya saing agar tetap bertahan dan berkembang. Daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada kualitas produk, modal, serta jaringan pemasaran, tetapi juga pada aspek legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi penting karena memberikan kepastian hukum, memperluas akses terhadap permodalan, membuka peluang kemitraan dan memperbesar jangkauan pasar. Mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik, salah satunya melalui transformasi digital dalam bidang perizinan. Sistem perizinan usaha yang sebelumnya manual kini diarahkan ke bentuk layanan online. Penerapan sistem perizinan usaha secara online diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan efisien, sekaligus mengurangi praktik birokrasi yang berbelit. Dengan

demikian, tercipta iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih kompetitif.

Kabupaten Barito Timur, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Barito Timur tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, serta industri rumah tangga. UMKM di daerah ini memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan baik dari segi proses maupun aksesibilitasnya masyarakat lokal. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM di Barito Timur masih menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya secara maksimal, terutama dalam hal akses terhadap perizinan, permodalan dan digitalisasi usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Timur telah mengimplementasikan sistem perizinan usaha berbasis digital melalui *Online Single Submission* (OSS). OSS hadir sebagai solusi atas perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu panjang dan birokrasi yang rumit. Melalui OSS, pelaku UMKM diharapkan dapat mendaftarkan usahanya secara mandiri, cepat dan transparan. DPMPTSP Barito Timur juga bertugas melakukan pendampingan teknis dan menyediakan layanan konsultasi untuk para pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam menggunakan sistem OSS. Meskipun demikian, dalam praktiknya, efektivitas layanan OSS masih belum optimal akibat sejumlah faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Barito Timur, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5.303 unit usaha, dengan 1.003 di antaranya berada di Kecamatan Dusun Tengah. Pada tahun yang sama, terdapat 631 usaha yang telah mengakses sistem Online Single Submission (OSS). Pada tahun 2024, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Barito Timur meningkat menjadi 5.393 unit usaha. Peningkatan juga terjadi di Kecamatan Dusun Tengah, yang mencapai 1.022 UMKM, dengan 916 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS. Hingga tahun 2025, jumlah UMKM di Kabupaten Barito Timur kembali mengalami kenaikan menjadi 5.413 unit usaha yang tersebar di berbagai kecamatan dan sektor usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.022 UMKM berada di Kecamatan Dusun Tengah, menjadikannya wilayah dengan konsentrasi UMKM tertinggi kedua di Kabupaten Barito Timur. Adapun pada tahun 2025 ini, sebanyak 760 NIB telah diterbitkan.

Tingginya jumlah UMKM ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal sangat besar jika dikelola dan didukung dengan baik, khususnya dalam aspek legalitas usaha dan akses terhadap fasilitas pemerintah. Namun, angka tersebut juga menggambarkan tantangan besar dalam hal pemerataan layanan, pembinaan, serta digitalisasi proses perizinan. Dengan tingginya jumlah UMKM yang tersebar, DPMPTSP Barito Timur dituntut untuk lebih adaptif dan proaktif dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam optimalisasi pemanfaatan sistem OSS agar menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif dan merata di setiap kecamatan.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi OSS belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa kendala masih

ditemui, seperti keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem digital, lemahnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha bahwa legalitas itu banyak memberikan manfaat. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga mengalami kesulitan teknis, mulai dari proses registrasi, input data, hingga kendala jaringan internet yang tidak stabil. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal OSS sebagai sistem yang cepat, transparan dan efisien dengan praktik pelaksanaannya ditingkat daerah.

Permasalahan yang ada pada efektivitas perizinan online (OSS) bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui legalitas usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Timur ditemukan permasalahan antara lain:

1. Kendala teknis dan sistem, Salah satu permasalahan utama dalam penerapan OSS di Kabupaten Barito Timur adalah kendala teknis dan sistem. Meskipun sistem OSS dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, kenyataannya masih sering terjadi gangguan teknis seperti server yang lambat, error saat pengisian data, serta kesulitan dalam mengunggah dokumen sehingga penerbitan NIB tidak tepat waktu. Selain itu, infrastruktur teknologi di beberapa wilayah Barito Timur masih belum merata, terutama di daerah pedesaan yang minim akses terhadap jaringan internet yang stabil. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengakses sistem OSS secara mandiri dan pada akhirnya tetap harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan bantuan. Namun, komputer yang digunakan untuk mengakses OSS juga terbatas sehingga pada saat

pembuatan NIB memerlukan waktu yang cukup lama dan saat banyak yang ingin membuat NIB maka harus mengantri. Ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya siap ini menjadi hambatan serius dalam mendukung sistem pelayanan perizinan digital yang ideal.

(Sumber: Data Inventaris Kantor DPMPTSP Barito Timur)

2. Keterbatasan kemampuan mengakses sistem, Keterbatasan pemahaman terhadap program ini merupakan tantangan signifikan dalam pelaksanaan OSS di Barito Timur. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan berusia lanjut, belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan perangkat digital seperti komputer atau smartphone. Mereka juga belum terbiasa dengan proses administrasi digital, seperti membuat akun, mengisi formulir online, atau mengunggah dokumen dalam format tertentu. Rendahnya pemahaman terhadap teknologi informasi ini menyebabkan mereka merasa kesulitan atau bahkan enggan untuk mengurus legalitas usaha melalui OSS. Akibatnya, tidak sedikit pelaku UMKM yang lebih memilih tidak mengurus perizinan sama sekali atau masih bergantung pada bantuan orang lain, yang justru dapat membuka peluang terjadinya praktik percaloan. *(Sumber: Data Tingkat Pendidikan Komunitas UMKM)*
3. Sosialisasi belum merata, hal ini menyebabkan tingkat pemahaman pelaku usaha tersebut tidak memahami betapa pentingnya izin usaha. Dengan adanya sosialisasi maka masyarakat memahami mengenai pentingnya izin usaha. Meskipun pemerintah daerah melalui DPMPTSP Barito Timur telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai sistem OSS, kenyataannya

penyebaran informasi tersebut belum menjangkau seluruh wilayah dan kalangan masyarakat secara merata. Sosialisasi yang dilakukan sering kali hanya terpusat di wilayah ibu kota kabupaten atau kota kecamatan, sementara pelaku UMKM yang berada di desa-desa terpencil masih belum banyak mengetahui keberadaan maupun manfaat dari OSS. Bahkan, beberapa pelaku usaha mengaku baru mendengar tentang OSS ketika hendak mengurus izin secara langsung di kantor pelayanan. kurangnya media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, serta belum maksimalnya peran perangkat desa dalam menyebarluaskan informasi turut memperkuat ketimpangan pemahaman dan pemanfaatan OSS di kalangan pelaku UMKM. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi komunikasi publik dan pendampingan pemerintah perlu diperkuat agar transformasi digital pelayanan publik benar-benar inklusif dan menyeluruh agar tercapainya tujuan dengan meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki NIB. *(Sumber: Hasil Observasi)*

Situasi ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya terkait efektivitas OSS dalam memberikan layanan perizinan bagi UMKM. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dipandang relevan karena dapat menggali pengalaman, persepsi dan pandangan pelaku UMKM serta aparatur DPMPTSP mengenai penerapan OSS. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai OSS dari segi teknis, tetapi juga mencoba memahami makna pelayanan publik digital dari sudut pandang pengguna layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana OSS benar-benar efektif sebagai sistem pelayanan perizinan usaha, khususnya dalam mendukung perkembangan UMKM di tingkat daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul: **“Efektivitas Sistem Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara Online (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis mmefokuskan pada pembahasan efektivias sistem perizinan usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM dan DPMPTSP Kabupaten Barito Timur. berdasarkan latar belakang maka penelitian ini hanya berfokus pada teori efektivitas menurut Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) menyebutkan bahwa efektivitas suatu program atau kegiatan dapat diukur melalui lima indikator utama yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan usaha UMKM melalui sistem online single submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur?

2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi pelaku UMKM maupun pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penerapan sistem perizinan online (OSS)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan perizinan usaha UMKM melalui sistem *online single submission* (OSS) pada DPMPTSP Kabupaten Barito Timur.
- b. Mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi pelaku UMKM maupun pihak DPMPTSP dalam penerapan sistem perizinan online (OSS).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen UMKM. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi akademis untuk memahami sejauh mana efektivitas OSS berkembang di kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam melaksanakan proses penelitian ilmiah secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, penulis dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi langkah awal dalam membangun sikap profesional dan tanggung jawab akademik yang dibutuhkan di dunia kerja maupun jenjang pendidikan selanjutnya.

2) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan sistem OSS dalam mempercepat proses legalitas usaha dan partisipasi pelaku UMKM agar taat aturan untuk membuat izin usahanya.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan usaha berbasis online agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.